IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN

Denny Iswanto[1]

[1]*Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Wijaya Putra*
Jl. Pd. Benowo Indah Ide. 1-3 Kota Surabaya
Email: dennyiswanto@uwp.ac.id

ABSTRAK

Reformasi birokrasi merupakan agenda krusial bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan, mengevaluasi perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahunan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi capaian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder yang berasal dari dokumen resmi seperti Peraturan Bupati dan laporan evaluasi, serta didukung oleh berita dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam capaian Indeks Reformasi Birokrasi, khususnya dari skor 75,89 dengan predikat BB pada tahun 2023 menjadi skor 86,48 dengan predikat A pada tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2021-2025, perbaikan berkelanjutan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang konsisten meraih predikat A, serta berbagai inovasi pelayanan publik yang diakui di tingkat regional maupun nasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan berjalan secara progresif dan menunjukkan komitmen yang kuat, namun tetap memerlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola serta memastikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Implementasi Kebijakan, Indeks Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan.

ABSTRACT

Bureaucratic reform is a crucial agenda for local governments in Indonesia to realize good governance and excellent public services. This study aims to analyze the implementation of bureaucratic reform policies in Lamongan Regency, evaluate the development of the annual Bureaucratic Reform Index (IRB), and identify factors that influence these achievements. The research method used is a descriptive qualitative approach with secondary data analysis derived from official documents such as Regent Regulations and evaluation reports, and supported by news and related scientific literature. The results of the study show that Lamongan Regency has shown a significant increase in the achievement of the Bureaucratic Reform Index, especially from a score of 75.89 with a BB predicate in 2023 to a score of 86.48 with an A predicate in 2024. This increase is supported by the implementation of the 2021-2025 Bureaucratic Reform Roadmap, continuous improvements in the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) which consistently achieves an A predicate, and various public service innovations that are recognized at the regional and national levels. The conclusion of this study is that the implementation of bureaucratic reform policies in Lamongan Regency is running progressively and shows a strong commitment, but still requires ongoing efforts to maintain and improve the quality of governance and ensure a real impact on community welfare.
Keywords: Keywords: Bureaucratic Reform, Policy Implementation, Bureaucratic Reform Index, Governance

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan dan mandat berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance),* menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel. Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan, memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) (Iswanto, 2024). Lebih lanjut, urgensi reformasi birokrasi tidak hanya berhenti pada perbaikan sistem dan manajemen internal instansi pemerintah, tetapi harus mampu memberikan dampak yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan pembangunan nasional (Kusuma, 2022).

Pada tataran pemerintah daerah, implementasi reformasi birokrasi memegang peran yang sangat strategis. Pemerintah daerah merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat (Putra, 2025). Keberhasilan reformasi birokrasi di tingkat daerah akan berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan percepatan pembangunan regional (Iswanto & Putra, 2023). Meskipun demikian, pemerintah daerah seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi, mulai dari keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, hingga kompleksitas koordinasi antar instansi.

Kabupaten Lamongan, sebagai salah satu pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur, menunjukkan komitmen yang serius dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Komitmen ini salah satunya diwujudkan melalui penetapan landasan hukum formal, yaitu Peraturan Bupati Lamongan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025. Keberadaan roadmap ini menjadi indikasi adanya perencanaan strategis dan upaya terstruktur dalam mewujudkan birokrasi yang lebih baik. Studi kasus implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan menjadi menarik, terutama dengan adanya indikasi peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Lamongan bukan hanya sekadar pemenuhan tuntutan administratif, melainkan sebuah upaya strategis yang mulai menunjukkan hasil nyata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan berdasarkan Roadmap Reformasi Birokrasi 2021-2025? (2) Bagaimana tren perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun, khususnya capaian terkini? (3) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan?

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan. (2) Menyajikan dan menganalisis data Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan secara berkelanjutan. (3) Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi capaian reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif (Moleong, 2017) Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan reformasi birokrasi, melakukan interpretasi terhadap data, dan menggali konteks yang melingkupinya. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Iswanto, 2023).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer berupa dokumen resmi dan data sekunder. Data primer dokumen mencakup Peraturan Bupati Lamongan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025. Dokumen ini menjadi rujukan utama karena menguraikan strategi, sasaran, dan

rencana aksi reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan. Selain itu, dokumen Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Lamongan juga menjadi sumber data penting, meskipun akses terhadap laporan detailnya mungkin terbatas dan lebih banyak merujuk pada pemberitaan capaiannya. SAKIP merupakan indikator kunci yang mencerminkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi.

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber. Data Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Lamongan diperoleh dari pemberitaan media yang merujuk pada rilis resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) atau Pemerintah Kabupaten Lamongan. Perlu dicatat bahwa data IRB tahunan yang sangat detail sebelum tahun 2023 untuk Kabupaten Lamongan tidak secara spesifik ditemukan dalam materi riset yang diakses, meskipun KemenPAN-RB memiliki dataset hingga tahun 2022. Artikel ilmiah dan jurnal terkait implementasi reformasi birokrasi, reformasi birokrasi tematik, SAKIP, dan inovasi pelayanan publik juga menjadi sumber data sekunder yang relevan. Selain itu, berita dan publikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Lamongan atau KemenPAN-RB terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Lamongan turut digunakan, begitu pula dengan buku dan literatur umum mengenai reformasi birokrasi dan kebijakan publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan melakukan telaah mendalam terhadap dokumen-dokumen kebijakan, laporan resmi, artikel ilmiah, dan berita yang relevan. Observasi tidak langsung juga dilakukan melalui analisis terhadap pemberitaan dan publikasi daring yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis isi (content analysis) terhadap dokumen kebijakan dan laporan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci, program prioritas, dan capaian. Analisis komparatif dilakukan untuk melihat perkembangan IRB dari waktu ke waktu, berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya, dilakukan interpretasi data untuk mengidentifikasi pola, tren, faktor pendukung, dan potensi penghambat dalam implementasi reformasi birokrasi. Seluruh informasi yang terkumpul kemudian disintesis untuk membangun argumen yang koheren dan menjawab pertanyaan penelitian. Kekuatan analisis dalam penelitian ini didukung oleh triangulasi sumber data, yang melibatkan penggunaan beragam jenis data (dokumen resmi, berita, literatur ilmiah) untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan, meskipun penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yang utamanya berbasis pada data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

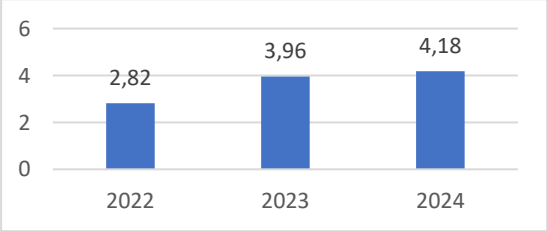
Gambaran Umum Kebijakan Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan

Implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan didasarkan pada komitmen kuat dan kerangka kerja yang jelas, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025. Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai panduan strategis yang memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi secara rinci, berkelanjutan, efektif, efisien, terukur, dan konsisten. Tujuan utama dari *roadmap* ini adalah untuk menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, dan sungguh-sungguh, serta mendorong perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025 mengamanatkan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk menetapkan dan melaksanakan program-program prioritas reformasi birokrasi. Lebih lanjut, setiap PD juga diwajibkan untuk menyusun *roadmap* reformasi birokrasi internal masing-masing dan melaksanakan program yang merupakan elaborasi dari program prioritas tingkat kabupaten. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan agenda reformasi birokrasi di semua lini pemerintahan daerah. Sebuah aspek penting yang ditekankan dalam Peraturan Bupati tersebut adalah bahwa keberhasilan implementasi reformasi birokrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten atau Perangkat Daerah tertentu, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lamongan. Keterlibatan aktif dan komitmen dari seluruh elemen birokrasi menjadi kunci pencapaian sasaran reformasi.

Meskipun dokumen Peraturan Bupati Lamongan Nomor 92 Tahun 2021 yang diakses tidak merinci secara eksplisit delapan area perubahan standar reformasi birokrasi, dapat dipahami bahwa *roadmap* tersebut secara umum akan mencakup aspek-aspek fundamental yang menjadi fokus reformasi birokrasi nasional. Area-area tersebut biasanya meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Adanya penyusunan *roadmap* untuk penajaman implementasi reformasi birokrasi tematik dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lamongan juga mengindikasikan bahwa fokus reformasi diarahkan pada pencapaian dampak nyata bagi masyarakat dan pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dan efektivitas pemerintahan.



Gambar 1. Indeks SPBE Kab. Lamongan 2022-2024
Sumber: (KemenpanRB, 2024)

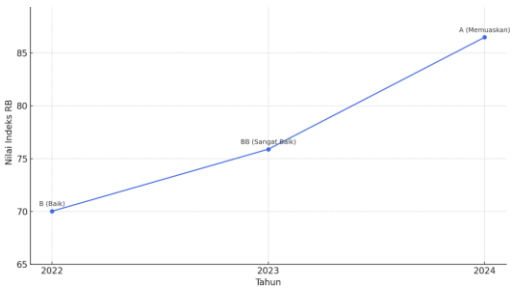
Data diatas menunjukkan Indeks SPBE Kabupaten Lamongan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, indeks SPBE berada di angka 2,82. Angka ini kemudian mengalami kenaikan menjadi 3,96 pada tahun 2023, dan terus meningkat hingga mencapai 4,18 pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lamongan. Keberadaan kerangka kerja strategis ini menjadi landasan penting untuk menilai sejauh mana implementasi reformasi birokrasi telah berjalan dan memberikan hasil yang diharapkan.

Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Lamongan

Salah satu indikator utama keberhasilan implementasi reformasi birokrasi adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, Kabupaten Lamongan menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam capaian IRB. Data terkini yang signifikan berasal dari pemberitaan yang merujuk pada evaluasi resmi, menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Kabupaten Lamongan meraih skor IRB sebesar 75,89 dengan predikat BB (Sangat Baik). Capaian ini kemudian mengalami peningkatan yang luar biasa pada tahun 2024, dimana skor IRB melonjak menjadi 86,48 dengan predikat A (Memuaskan).[10] Informasi serupa juga dikonfirmasi oleh sumber lain yang menyebutkan peningkatan dari 75,89 menjadi 86,48 dengan predikat A, meskipun tanpa menyebutkan tahun secara spesifik, yang kemudian diklarifikasi oleh data tahunan tersebut.[9]

Perlu disampaikan bahwa ketersediaan data IRB tahunan yang detail untuk Kabupaten Lamongan sebelum tahun 2023 tidak secara eksplisit ditemukan dalam materi riset yang digunakan untuk penyusunan artikel ini. Meskipun portal data Kementerian PANRB menyebutkan ketersediaan dataset IRB hingga tahun 2022 untuk berbagai instansi [11], angka spesifik untuk Kabupaten Lamongan pada tahun-tahun tersebut tidak dapat diakses secara langsung.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan IRB Kabupaten Lamongan berdasarkan data yang tersedia, disajikan tabel berikut:



Gambar 2. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan
Sumber: Diolah peneliti berdasarkan data yang tersedia, 2025

Analisis terhadap data pada Tabel 1 menunjukkan adanya lompatan yang sangat signifikan dalam skor IRB Kabupaten Lamongan hanya dalam kurun waktu satu tahun, yaitu dari 75,89 (predikat BB) pada tahun 2023 menjadi 86,48 (predikat A) pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 10,59 poin ini tidak hanya mengubah predikat dari "Sangat Baik" menjadi "Memuaskan", tetapi juga menandakan sebuah akselerasi yang substansial dalam upaya perbaikan tata kelola dan birokrasi di Kabupaten Lamongan. Peningkatan ini bahkan disebut sebagai "naik kelas" bagi reformasi birokrasi Lamongan.[10] Lompatan signifikan seperti ini jarang terjadi secara gradual dan biasanya mengindikasikan adanya intervensi kebijakan atau upaya intensif yang berhasil diimplementasikan selama periode tersebut. Hal ini memunculkan dugaan bahwa program-program dalam Roadmap RB 2021-2025 mulai menunjukkan hasil yang optimal, atau adanya fokus khusus pada area-area tertentu yang memiliki bobot penilaian tinggi dalam IRB.

Analisis Mendalam Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi

Peningkatan signifikan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Lamongan dari predikat BB menjadi A dalam satu tahun terakhir tidak terjadi secara tiba-tiba. Capaian ini merupakan buah dari serangkaian upaya sistematis dan implementasi kebijakan yang terencana, yang didukung oleh berbagai faktor. Salah satu fondasi utama adalah keberadaan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025.

Roadmap ini menyediakan kerangka kerja dan arah yang jelas bagi seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program-program prioritas reformasi birokrasi. Keterkaitan antara program-program dalam *roadmap* dengan capaian IRB menjadi nyata. Sebagai contoh, penekanan pada digitalisasi melalui SPBE, sebagaimana diungkapkan dalam upaya penyusunan *roadmap* untuk penajaman implementasi RB tematik dan SPBE, secara langsung berkontribusi pada area penataan tatalaksana dan peningkatan kualitas pelayanan publik, yang merupakan komponen penting dalam penilaian IRB.

Peran kepemimpinan dan komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan daerah juga menjadi faktor determinan. Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati dalam berbagai acara terkait evaluasi SAKIP dan reformasi birokrasi serta pernyataan Bupati Yuhronur Efendi mengenai komitmen untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui reformasi birokrasi menunjukkan adanya dukungan politik dan pengawalan yang konsisten terhadap agenda reformasi.

Penguatan akuntabilitas kinerja, yang tercermin dalam capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan pilar penting lainnya. Kabupaten Lamongan berhasil meraih predikat A (memuaskan) untuk SAKIP sebanyak enam kali berturut-turut hingga Desember 2023. Sebelumnya, penghargaan SAKIP dengan predikat A juga diterima untuk tahun 2021. Bahkan, pada level unit kerja, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan berhasil meraih nilai SAKIP "AA" (Sangat Memuaskan) pada tahun 2024. Prestasi SAKIP yang konsisten ini menunjukkan adanya kematangan dalam sistem manajemen kinerja, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi kinerja internal. Sistem SAKIP yang baik dan telah teruji ini secara inheren menyediakan fondasi yang kokoh bagi peningkatan IRB, karena banyak aspek yang dinilai dalam SAKIP juga merupakan bagian integral dari delapan area perubahan reformasi birokrasi. Dengan kata lain, birokrasi yang akuntabel dan berorientasi kinerja akan lebih mudah mencapai sasaran-sasaran reformasi birokrasi secara keseluruhan.

Selanjutnya, fokus pada inovasi pelayanan publik juga memberikan kontribusi signifikan. Kabupaten Lamongan menunjukkan geliat inovasi yang tinggi, khususnya di bidang kesehatan. Berbagai inovasi seperti LASERKU (Lamongan Sehat dan Sejahtera dengan Kunjungan Rumah), ISUK (Investasi Sampah Untuk Kesehatan), dan RANSEL SI DORA SIAP (Gerakan Selamatkan Ibu Hamil dengan Siaga Donor Darah Terintegrasi Dalam Aplikasi) berhasil masuk dalam TOP 15 SINOLLA (Sistem Inovasi Pelayanan Publik Lamongan) tahun 2023 (Pemprov. Jatim, 2025). Bahkan, inovasi LASERKU berhasil menjadi TOP 1

MEGNOTEK (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur) tahun 2024. Upaya transformasi digital dalam berbagai layanan publik juga terus digalakkan. Inisiatif-inisiatif inovatif ini secara langsung menjawab tuntutan reformasi birokrasi dalam area peningkatan kualitas pelayanan publik (Iswanto et al., 2024). Keberhasilan inovasi yang diakui di tingkat regional maupun nasional tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan, tetapi juga berpotensi besar mendongkrak persepsi positif masyarakat dan penilaian eksternal, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan skor IRB.

Adopsi pendekatan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik juga menandakan adanya evolusi strategis dalam pelaksanaan reformasi di Kabupaten Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mulai menyusun *roadmap* untuk penajaman implementasi RB tematik. Langkah ini sejalan dengan arahan kebijakan nasional yang mendorong reformasi birokrasi agar lebih fokus pada penyelesaian isu-isu prioritas pembangunan dan memberikan dampak langsung yang dirasakan masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan digitalisasi administrasi pemerintahan (Ari Nugroho et al., 2021). Peralihan atau pelengkapan dari RB general yang lebih bersifat administratif menuju RB Tematik yang berorientasi pada solusi masalah publik spesifik menunjukkan tingkat kematangan yang lebih tinggi dalam pelaksanaan reformasi. Ini mengisyaratkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak hanya berpuas diri dengan perbaikan internal semata, tetapi berupaya agar reformasi birokrasi benar-benar menjadi instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Keberhasilan implementasi RB Tematik di masa mendatang berpotensi mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian IRB, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik.

Secara sintesis, faktor-faktor pendukung keberhasilan reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan meliputi: komitmen kepemimpinan yang kuat dan berkelanjutan, adanya *Roadmap* RB yang jelas sebagai panduan implementasi, sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) yang telah matang dan terbukti berkinerja tinggi, tumbuhnya budaya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta upaya progresif menuju digitalisasi layanan dan administrasi pemerintahan (SPBE) (Khaidarmansyah & Saifuddin, 2022).

Meskipun demikian, beberapa potensi tantangan dan area peningkatan tetap perlu menjadi perhatian. Pertama, mempertahankan predikat A IRB memerlukan konsistensi upaya dan inovasi berkelanjutan, karena standar dan ekspektasi publik terus meningkat. Kedua, memastikan bahwa dampak positif reformasi birokrasi dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai sektor dan wilayah. Ketiga, implementasi RB Tematik yang lebih kompleks membutuhkan penguatan kolaborasi lintas sektor yang lebih intensif dan terkoordinasi. Keempat, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) ASN secara berkelanjutan agar mampu beradaptasi dengan perubahan, menguasai teknologi, dan terus berinovasi. Kelima, memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai, baik anggaran maupun infrastruktur teknologi, untuk mendukung program-program reformasi birokrasi yang semakin ambisius.

Keberhasilan Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan IRB dan SAKIP, yang diperkuat dengan inisiatif RB Tematik dan budaya inovasi, mengindikasikan mulai terbentuknya sebuah siklus perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement cycle*). Capaian di satu area, seperti SAKIP yang solid, terbukti memperkuat dan menjadi landasan bagi peningkatan di area lain, seperti IRB. Dorongan untuk terus berinovasi dan mengadopsi pendekatan RB Tematik menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak berpuas diri dengan capaian saat ini dan berupaya untuk tidak terjebak dalam stagnasi. Ini adalah ciri positif dari sebuah birokrasi yang dinamis dan organisasi pembelajar, yang terus berusaha meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanannya demi kepentingan publik yang lebih luas.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan, yang secara strategis dipandu oleh Peraturan Bupati Lamongan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025, telah menunjukkan hasil yang

progresif dan sangat signifikan. Hal ini tercermin jelas dari lonjakan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dari skor 75,89 dengan predikat BB (Sangat Baik) pada tahun 2023 menjadi skor 86,48 dengan predikat A (Memuaskan) pada tahun 2024. Peningkatan substansial ini menandakan keberhasilan nyata dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas birokrasi di Kabupaten Lamongan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai faktor kunci. Komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan daerah, adanya kerangka kerja reformasi birokrasi yang jelas dan terukur melalui roadmap, serta sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) yang solid dan konsisten meraih predikat A, menjadi fondasi utama. Selain itu, tumbuhnya budaya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan atas inovasi daerah, serta upaya berkelanjutan menuju digitalisasi administrasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), turut mengakselerasi pencapaian positif ini. Lebih lanjut, langkah Kabupaten Lamongan untuk mulai mengadopsi pendekatan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik menunjukkan adanya visi strategis untuk memastikan bahwa reformasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dampak langsung dan solusi konkret terhadap isu-isu prioritas yang dihadapi masyarakat.

Meskipun capaian yang diraih sangat membanggakan, tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi kinerja, melanjutkan upaya perbaikan secara berkelanjutan, dan memastikan bahwa manfaat dari reformasi birokrasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lamongan. Keberhasilan Lamongan ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi daerah lain mengenai pentingnya upaya sistematis, komitmen kepemimpinan, dan inovasi berkelanjutan dalam mewujudkan birokrasi yang melayani dan berkinerja tinggi.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:
Untuk Pemerintah Kabupaten Lamongan:

1. Terus mempertahankan dan meningkatkan komitmen pimpinan serta seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai agenda prioritas yang berkelanjutan.
2. Melakukan evaluasi secara berkala dan komprehensif terhadap implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi, serta melakukan penyesuaian strategi dan program kerja seiring dengan dinamika tuntutan pelayanan dan kebutuhan masyarakat.
3. Memperkuat dan mengakselerasi implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dengan fokus pada isu-isu strategis daerah seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan digitalisasi layanan, serta memastikan adanya kolaborasi lintas sektor yang efektif dan terukur.
4. Terus mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya budaya inovasi di semua lini pelayanan publik, serta memperluasimplementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan.
5. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM ASN secara berkelanjutan melalui program pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan perkembangan teknologi.
6. Memastikan alokasi sumber daya yang memadai, baik anggaran maupun infrastruktur pendukung, untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan program-program reformasi birokrasi yang semakin ambisius.
7. Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang partisipatif untuk memastikan bahwa dampak reformasi birokrasi dirasakan secara nyata dan merata oleh masyarakat, terutama melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelesaian isu-isu prioritas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ari Nugroho, A., Noor, M., & Christiani, C. (2021). Evaluasi Perencanaan Dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Di Indonesia (Reformasi Birokrasi Tematik). *Jurnal Media Administrasi*, *6*(2).

Iswanto, D. (2023). Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 Dalam Perspektif Evidence Based Policy. *Jurnal Inovasi Daerah*, *2*(2), 167–178. https://doi.org/10.56655/jid.v2i2.134

Iswanto, D. (2024). Bureaucratic Reform Through Organizational Rightsizing: Study on Changes in the Nomenclature of the Regional Planning, Research And Innovation Agency (Bapperida) of Pasuruan Regency. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *50*(1), 39–49. https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i1.3619

Iswanto, D., Miskan, D. E. P. Z., & Solikha, W. S. (2024). *Public Sector Digital Transformation: Analysis of Digital Literacy of Government Apparatus in Kepatihan Village, Menganti District, Gresik Regency*. https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jpap.v10i2.11732

Iswanto, D., & Putra, R. A. (2023). Evaluation of Bureaucratic Reforms in Realizing World Class Government in Tuban. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, *18*(2), 139–156. https://doi.org/10.20961/sp.v18i2.72811

KemenpanRB. (2024). *Laporan Evaluasi SPBE 2024*. https://www.menpan.go.id/site/download/file/6985-laporan-pelaksanaan-evaluasi-spbe-tahun-2024

Khaidarmansyah, K., & Saifuddin, R. (2022). Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Lampung. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, *16*(1), 85–95.

Kusuma, T. P. (2022). Reformasi Birokrasi dalam Aspek Efisiensi dan Transparansi pada Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Kota Batu. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 7(1), 1-9.*, *7*(1), 1–9.

Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Pemprov. Jatim. (2025). *Pemkab Lamongan Terus Berupaya Hadirkan Layanan Kesehatan Berkualitas*. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/pemkab-lamongan-terus-berupaya-hadirkan-layanan-kesehatan-berkualitas

Putra, I. M. D. (2025). Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Upaya Mempertahankan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*, *4*(1), 177–206.